

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami modernisasi. Teknologi dan pengetahuan juga semakin berkembang pesat seiring perubahan zaman. Salah satu aspek yang mewakili pilar bangsa adalah bidang pendidikan, karena hal ini dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan suatu negara untuk mempersiapkan generasi yang baik sehingga perlu dilakukan pengawasan di semua bagian pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beragama dan berakhlak mulia, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasman dan rohani, serta bertindak dengan rasa tanggungjawab (Setiyorini & Setiawan, 2023). Kebijakan pemerintah diperlukan untuk membuat peraturan atau mengelola aktivitas yang bisa memudahkan regulasi pendidikan agar bisa memberdayakan manusia supaya dapat memenuhi tujuan pendidikan yang optimal.

Pendidikan Pancasila mempunyai peran sangat penting dalam membentuk karakter positif masyarakat Indonesia, termasuk peserta didik. Pancasila merupakan ideologi negara yang dianggap sebagai dasar suatu bangsa dan wajib dipertahankan oleh setiap masyarakat untuk mewujudkan tatanan hidup yang harmonis dengan ikatan kerukunan (Natalia et al., 2023). Pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo, telah mendorong sejumlah pemenuhan dalam hal penguatan penerapan nilai-nilai pancasila pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, mengacu pada momentum ketika Pancasila pertama kali diperkenalkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Selain itu, pemerintah membentuk lembaga bernama Badan Pembinaan Pendidikan

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (B.P7) serta Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, dibentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Namun, kurang dari setahun kemudian, UKP-PIP dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, dan pemerintah menggantikannya dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Hermanto, 2021).

BPIP, atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mahfud MD menyampaikan bahwa alasan membentuk lembaga ini karena berbagai gerakan-gerakan radikal yang jika tidak diatasi maka akan menjadi ancaman ideologi Pancasila (Fatmala, 2019). Kepala BPIP menyampaikan kepada satuan Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dalam hal mempertanggungjawabkan Pendidikan Pancasila maka perlu adanya Pedoman dalam menerapkannya. Para pengajar dalam hal ini adalah guru merupakan orang yang juga bertanggung jawab dalam Pendidikan Pancasila. Proses didalam Pancasila yang menyesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik. Pentingnya segera melakukan perubahan Pendidikan Pancasila sesuai kurikulum yang berlaku. Upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap Pendidikan Pancasila merupakan tanggungjawab bersama serta bekerjasama dengan melibatkan lembaga lain seperti Kemendikbudristek (Aulia, 2023).

Tujuan kurikulum menurut Kemendikbudristek adalah mampu mewujudkan Indonesia yang bebas berpendapat, mandiri, dan memiliki karakter Pancasila seperti beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu berkomunikasi secara interkultural tanpa meninggalkan rasa cinta tanah air Indonesia (Kemendikbudristek, 2015).

Kurikulum "merdeka belajar" didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan pendidikan yang lebih berkualitas dan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang ahli dalam bidang menghafal tetapi juga memiliki kemampuan menganalisa yang kuat, pemikiran logis, dan pemahaman pribadi dan memiliki potensi pengembangan diri yang mumpuni. Membangun lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas memerlukan kurikulum yang efektif serta efisien. (Khairunissa & Juli Ratnawati, 2021).

Pada abad-21 perlu adanya Kurikulum untuk memperkuat kemandirian peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dengan menekankan pemberdayaan dan pengembangan ketrampilan (Darmawan et al 2020).

Di kehidupan nyata, yang menjadi tujuan di Kurikulum Merdeka adalah memberikan kebebasan peserta didik dari doktrin yang terlalu teoritis dan memperkenalkan pembelajaran yang menyenangkan (Riyanto, 2019). Kurikulum Merdeka Belajar mengusung konsep kebebasan dalam berpikir, yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh peran guru. Guru memegang peran kunci dalam keberhasilan proses pembelajaran. Di era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan. Aktivitas pembelajaran, baik yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik, kini semakin terintegrasi dengan penggunaan perangkat berbasis digital (Nasution et al., 2023).

Merdeka belajar ini akan memungkinkan para peserta didik untuk lebih mementingkan pada pembelajaran dan membantu peserta didik bisa lebih belajar banyak. Namun, program pendidikan Merdeka Belajar juga masih memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, baik di sekolah maupun masyarakat. Selama berjalannya kebijakan ini, berbagai perdebatan muncul dan berkembang. Hal ini menandakan bahwa guru harus aktif menerapkan strategi pembelajaran mandiri dan berperan penting dalam implementasinya. (Lince, 2022).

Ini adalah elemen kunci keberhasilan kebijakan pembelajaran mandiri. Karena guru terlibat langsung dalam melaksanakan strategi pembelajaran yang telah dibuat, maka strategi tersebut tidak akan dapat berjalan maksimal jika guru yang melaksanakannya tidak mempunyai potensi, keterampilan, dan persiapan yang matang. Strategi pembelajaran mandiri ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Tujuan belajar mandiri dapat dicapai melalui tindakan yang tepat yang dilakukan oleh kepala sekolah, penyelenggara sekolah, pendidik, dan siswa. (Nyoman, 2022).

Dalam persiapan belajar mandiri, ada strategi khusus sebagai langkah awal penerapannya. Strategi khusus ini dimulai dengan merencanakan program bersama untuk kepala sekolah, pimpinan kurikulum, koordinator mata pelajaran, dan siswa. Berbagai praktik terbaik dapat diterapkan melalui diskusi internal yang melibatkan pemangku kepentingan sekolah, seperti waka kurikulum, koordinator, dan perwakilan peserta didik. Selain itu juga dilakukan pendampingan dan pelatihan dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan program pemerintah ini. Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku atau masih perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam.

Pendidikan merupakan aspek mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki daya saing, dan mampu beradaptasi terhadap tantangan zaman. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan strategis untuk mendukung pengembangan keterampilan peserta didik. Dalam konteks ini, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang hadir sebagai bagian dari upaya tersebut, termasuk di SMK PGRI 2 Ponorogo.

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berbasis Islam, memandang pentingnya integrasi nilai-nilai keagamaan, kreativitas, dan penguatan karakter pada proses pembelajaran. Sebagai wujud dalam mematuhi kebijakan, tentunya SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo juga menerapkan Program P5 ini dengan menyesuaikan yang ada di Kurikulum Merdeka Belajar. Program P5 yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik karena bisa menumbuhkan rasa gotong royong yang sudah mulai luntur di kalangan peserta didik. Kreatifitas yang perlu di kembangkan lagi, kemandirian, dan rasa peduli terhadap sesama.

Penelitian ini akan memfokuskan terkait Implementasi Program P5 dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo) yang masih mempunyai berbagai kendala dalam penerapannya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Program P5 dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Ponorogo khususnya di SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat diangkat dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

Memahami Implementasi Program P5 dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Ponorogo khususnya di SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Secara teoritis**, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan keilmuan khususnya kajian mengenai implementasi kebijakan kurikulum merdeka.
2. **Secara praktis**, manfaat praktis bagi penulis adalah mendapatkan wawasan selama proses penelitian baik dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka maupun dalam hal mengetahui evaluasi dari penerapan kebijakan kurikulum merdeka.

1.5 Penegasan Istilah

A. P5

P5 atau Proyek Peningkatan Profil Siswa Pancasila merupakan upaya untuk mengembangkan sifat dan keterampilan siswa yang sesuai dengan nilai-nilai mulia Pancasila. Profil Peserta Didik Pancasila mendukung Anda dalam menjelaskan tujuan dan visi pendidikan dengan cara yang lebih jelas bagi semua pihak terkait. Di samping itu, profil ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan siswa di Indonesia dalam membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Kemdikbud, 2024).

B. BP.7

BP.7 adalah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Pembentukan BP.7 terkait erat dengan sejarah politik dan sosial

Indonesia. Pasca kemerdekaan pada tahun 1945, Pancasila dapat diadopsi sebagai dasar negara Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 pembentukan BP.7 bertujuan untuk mengembangkan dan menggalakkan penghayatan dan pengalaman Pancasila di kalangan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Namun, seiring dengan perubahan politik dan reformasi pemerintahan di Indonesia, peran BP.7 telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Meskipun demikian, upaya untuk menggalakkan penghayatan dan pengamalan Pancasila terus dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui kebijakan pendidikan nasional.

C. *P4*

P4 adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang memuat suatu panduan yang berisi nilai-nilai, prinsip, dan ajaran Pancasila yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. *P4* diresmikan oleh Presiden Soeharto pada Tahun 1978.

D. *UKP-PIP*

UKP-PIP, atau Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, adalah sebuah unit kerja yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. UKP-PIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum terkait pembinaan ideologi Pancasila serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan.

E. *BPIP*

BPIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurut Perpres No. 7 Tahun 2018, BPIP merupakan revitalisasi dari UKP-PIP untuk menyempurnakan organisasi, tugas, dan fungsi sehingga bisa efektif. Misi BPIP adalah membantu Presiden dalam merumuskan pedoman kebijakan pengembangan Ideologi Pancasila,

mengkoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan perkembangan Ideologi Pancasila secara komprehensif dan berkesinambungan, serta menjamin standar pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pendidikan. memberikan rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Hasil penelitian terhadap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Pancasila.

1.6 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya penelitian tentang Program P5 beberapa kali dilakukan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Ema Zulfa Nihayah yang berjudul *"Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di SMKN 1 Jenangan Ponorogo"* pada tahun 2023. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya Manajemen di setiap penyusunan Program P5, mulai dari Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi demi kelancaran suatu kegiatan.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Meilin Nuril dan Iqnatia Alfiansyah pada tahun 2022 dengan judul penelitian *"Analisis Penerapan Profil Pelajar Pancasila dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar"*. Dalam penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa Taktik yang digunakan oleh pengajar dalam mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila mencakup pembelajaran yang berbeda-beda, proyek pembelajaran, dan kebiasaan tertentu. Untuk mencapai keberhasilan, pendidik perlu berpikir kreatif dalam proses pengajaran, sebab selain peran pendidik itu sendiri, faktor keluarga dan masyarakat juga berperan penting dalam pengembangan karakter siswa. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk mendukung perkembangan karakter yang positif bagi peserta didik.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Ahmad Teguh Purnawanto pada tahun 2022 dengan judul penelitian *"Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka"*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan yaitu keleluasaan dan fleksibilitas dihadirkan demi pendidikan yang lebih menyenangkan, bermakna, dan berkualitas.

Berfokus pada metode yang dikembangkan berupa proyek dengan harapan Satuan Pendidikan dapat menghidupkan budaya terbuka, penuh rasa ingin tahu dan semangat kolaboratif.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Teori Kebijakan Publik

Penelitian ini akan menggunakan teori kebijakan, yang pada dasarnya memiliki dua pandangan utama dalam memahami kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik dipandang sebagai produk dari negara, pemerintah, birokrasi, atau administrasi publik. Dalam pandangan ini, kebijakan dianggap sebagai hasil keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang terkait dengan kepentingan publik. Dalam konteks ini, kebijakan publik identik dengan hukum sebagai produk negara. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang mencakup: (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) perintah dari suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; (c) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, yang juga ditegaskan dalam Pasal 18. (Riant Nugroho, 2017).

Cakupan kajian kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan

kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Secara terminologi, pengertian kebijakan publik sebenarnya sangat banyak, tergantung dari sudut pandang mana kita memaknainya (Sunarto, 2015).

Kebijakan publik merupakan pilihan tindakan yang bersifat legal karena dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam kebijakan ini bersifat mengikat bagi aparatur pemerintahan, baik dalam menyusun rancangan perundang-undangan dan peraturan pemerintah untuk diajukan kepada parlemen, maupun dalam mengalokasikan anggaran guna mendukung implementasi program-program tertentu. (Medtek, 2010). Diharapkan bisa mengatur kebijakan yang efektif dan efisien.

Beragam definisi mengenai konsep kebijakan publik dapat disimpulkan ke dalam dua pandangan utama. Pertama, pandangan yang menganggap kebijakan publik pada umumnya erat kaitannya dengan segala hal yang dibuat oleh pemerintah. Pendekatan ini memiliki kesimpulan bahwa segala hal yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah kebijakan. Kedua, pandangan yang lebih menitikberatkan pandangan pada realisasi kebijakan publik (*Public Implementation*). Sudut pandang yang pertama pada kebijakan publik dipandang sebagai sebuah hal yang telah ditetapkan pemerintah dan telah memiliki maksud dan tujuan tertentu, sedangkan pandangan kedua menekankan bahwa kebijakan publik harus menghasilkan dampak atau akibat yang dapat diantisipasi sebelumnya. (Sutapa, 2008).

Dalam implementasi nya, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang mendesak atau manipulasi pada dimensi tertentu yang ada dalam kehidupan sebagaimana tertera dalam formulasi kebijakan, mengajak dan memanfaatkan masyarakat, keuangan atau juga dengan organisasi yang tersedia dalam upaya untuk memenuhi target dan sasaran kebijakan. Suatu kebijakan tidak ada artinya jika tidak

menjawab permasalahan yang ada, kecuali jika kebijakan yang dibuat sebagai kebijakan yang belum sempurna, maka kebijakan tersebut perlu dilakukan penyesuaian ulang (Sutmasa, 2021).

Sejalan dengan pernyataan di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh (Subianto, 2020) dalam bukunya melahirkan hasil tentang realisasi kebijakan publik tidak terbatas pada perilaku dan kegiatan aparat yang menjalankan tugas dan menciptakan kepatuhan di antara kelompok serta sasaran yang dituju, tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Jaringan-jaringan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, sehingga mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan publik dapat berupa dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan berdasarjan pengertian tersebut dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan seperti peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Edward III (1980:148) mengemukakan untuk efektifitasnya implementasi kebijakan harus diperhatikan empat indikator, yaitu 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya; 3) Disposisi; 4) Struktur Organisasi. Keempat indikator tersebut saling berhubungan satu sama lain (Ruhana & Yuliana, 2013)

Kebijakan Publik yang mengatur tentang pendidikan seiring berjalannya waktu juga sudah mengalami perubahan dan peningkatan. Hal ini memberikan kemudahan dan ruang gerak bagi tenaga pendidik di Indonesia memiliki kesempatan untuk berinovasi dan mengembangkan pendidikan karakter yang sejalan dengan cita-cita

pendidikan nasional. Banyak elemen yang berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, termasuk sasaran pendidikan, pengajar, siswa, alat pendidikan, dan lingkungan belajar. Semua elemen ini saling berkaitan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas.. (Hamidah, 2020).

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan rinci tentang bagaimana suatu aspek atau konsep akan diukur atau diidentifikasi dalam suatu studi atau proyek. Definisi ini memastikan bahwa konsep abstrak dapat dipahami dan diukur secara konsisten dan dapat direproduksi oleh peneliti lain. Definisi operasional membantu menentukan langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi aspek-aspek tersebut.

Dimensi	Data yang Diperoleh
Communication	Komunikasi yang efektif terkait Program P5 antara Pemerintah Pusat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo, dan SMK PGRI 2 Ponorogo serta SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Resource	Kompetensi guru maupun sarana prasarana yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam mendukung Program P5
Disposition	Sikap pelaksana kebijakan dalam mendukung Program P5 baik di SMK PGRI 2 Ponorogo maupun SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Organizational Structure	Pembentukan tim pengawas khusus oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo untuk memastikan Program P5 berjalan sesuai semestinya.
--------------------------	---

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Dari masing-masing dimensi terdapat tolak ukur yang dapat digunakan untuk mendalami implementasi Program P5 dalam kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Ponorogo khususnya di SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.

Dari dimensi *Communication* (Komunikasi), merupakan Komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo, dan SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam hal ini perlu adanya penyampaian informasi maupun sosialisasi ke instansi-instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo menunjuk Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum sebagai ujung tombak pelaksanaan Program P5. SMK PGRI 2 Ponorogo dengan Waka Kurikulum, Andy Dwi Restyawan, ST sedangkan Waka Kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, Anik Yulaika, S. Pd. Waka Kurikulum menjadi peran yang sangat penting dalam satuan Pendidikan, utamanya di tingkat SMA maupun SMK. Karena berjalannya setiap program dari pemerintah pasti melewati kurikulum sebelum dilaksanakan ke seluruh warga sekolah.

Selanjutnya, *Resource* (Sumber Daya), dengan adanya sosialisasi yang sudah dilaksanakan maka akan melahirkan kompetensi guru maupun sarana prasarana yang mendukung sesuai dengan kebijakan Kurikulum Merdeka baik yang diterapkan di SMK PGRI 2 Ponorogo maupun di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Kompetensi guru yang mumpuni akan memberikan pengalaman yang lebih baik ke peserta didik.

Dispotition (Disposisi), sikap pelaksana kebijakan dalam mendukung Program P5 di SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo membutuhkan peran penting baik dari Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, kemudian Guru yang mendukung inovasi pembelajaran berbasis proyek kepada peserta didik di masing-masing sekolah tersebut. Semua pihak yang ada di sekolah menjadi penentu dalam pengambilan sikap para pelaksana.

Organizational Structure (Struktur Organisasi), Pembentukan tim pengawas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo supaya memiliki kejelasan pembagian tugas untuk melakukan pengawasan maupun koordinasi kebijakan kurikulum merdeka belajar dengan SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Pengawas yang ditugaskan adalah Lukito S. Pd., M. MT sebagai Pengawas Sekolah Madya Pembina/IV A di SMK PGRI 2 Ponorogo dan Nurhayati Retnaningtyas, S. Pd., M.M sebagai Pengawas Sekolah Madya Pembina TK.I/IV B di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih mengenai bagaimana peneliti memahami dan mengartikan makna dari suatu peristiwa, interaksi, atau perilaku subjek dalam situasi tertentu menurut sudut pandang peneliti. (Feny Rita Fiantika et all, 2022).

Menurut pendapat (Creswell W, 2017) yaitu penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam menciptakan pernyataan pengetahuan dengan melihat dari sudut pandang konstruktif. Selain itu juga dapat dilihat dari sudut pandang

partisipatif seperti fokus pada politik, permasalahan, kerjasama, atau pergantian dan gabungan dari keduanya. Hal ini berarti penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk membangun pengetahuan dari sudut pandang tertentu yang mengacu pada pandangan dan data yang ada dari subjek penelitian. Beragam sumber data seperti catatan observasi, transkrip wawancara, pengalaman pribadi, dan sejarah bisa digunakan untuk mendukung interpretasi ini.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam mengevaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMA/SMK mengenai program P5 di Kabupaten Ponorogo berlokasi di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo tepatnya beralamat di Jalan Gajah Mada No. 40, Kelurahan Surodikraman, Kabupaten Ponorogo. Kemudian di SMK PGRI 2 Ponorogo yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Babadan, Ponorogo. Selanjutnya, di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang berada di Jalan Batoro Katong No. 6B, Desa Nologaten, Kabupaten Ponorogo. Tempat penelitian adalah area di mana peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan. Tempat penelitian adalah lokasi di mana penelitian akan berlangsung. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan minat dan relevansi dengan tema yang diangkat. Dengan menentukan lokasi tersebut, diharapkan peneliti dapat menemukan informasi yang berarti dan baru.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian berupaya memaparkan kesimpulan dari penelitian ini dengan menyatakan bahwa semua objek yang mencakup berbagai sumber atau narasumber dapat menjabarkan berbagai informasi dan isu tentang penelitian yang akan dilakukan kedepannya. Subjek dalam penelitian dapat diartikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang merupakan objek dari tema penelitian yang bisa memberikan data yang valid.

Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber adalah teknik *snowball*, di mana informan dipilih berdasarkan rekomendasi atau saran dari informan satu ke yang lain dengan mempertimbangkan kesesuaian informan dengan tujuan yang ada dalam penelitian ini, seperti memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus tentang topik yang diteliti, dengan acuan pada data yang akurat dan mendalam. Menurut (Etikan, 2016) mengatakan bahwa informan dipilih berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang searah dengan penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

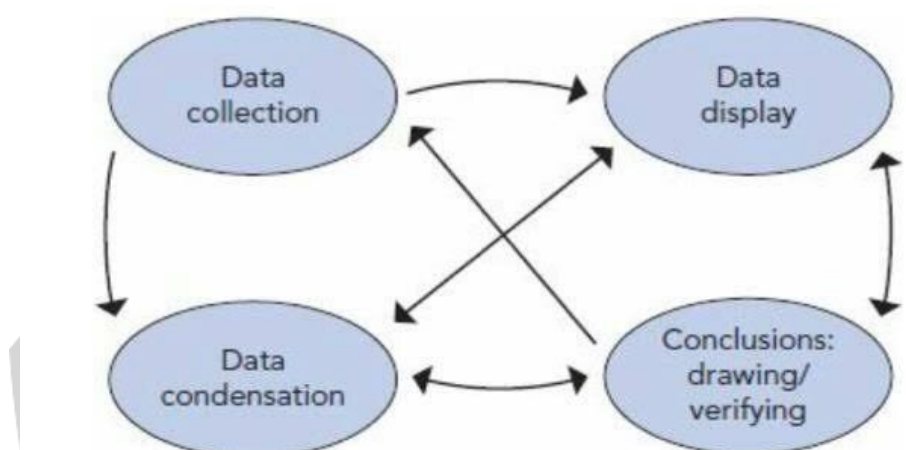
Dalam memperoleh data, teknik yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

- Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan bertemu secara langsung kepada seseorang atau informan dan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan informasi.
- Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku, aktivitas, atau fenomena secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan realistis.
- Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan dokumen yang sudah ada, seperti catatan, laporan, artikel, atau buku untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung.

Dengan ketiga cara pengumpulan data tersebut, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dan kaya, yang tidak hanya mendukung validitas penelitian tetapi juga memberikan pemahaman mendalam terhadap topik yang sedang dikaji.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Metode penelitian analisis deskriptif yg mendeskripsikan objek dan masalah penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk mengungkapkan data-data yg telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data pada bentuk uraian kata. Data-data tadi dijelaskan atau dibahas menggunakan pikiran peneliti sehingga menjadi instrumen utama. Teknik Analisis Data menurut (Miles et all, 2014) yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1 Teknik Analisis Data Miles et all, 2014

- *Data Collection*, yaitu pengumpulan data sistematis dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan masalah melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- *Data Display*, yaitu proses menyusun dan menyajikan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang terstruktur agar lebih mudah dipahami.
- *Data Condensation*, yaitu proses merangkum atau menyederhanakan yang melibatkan seleksi, pengelompokan, dan penyusunan ulang data untuk fokus pada informasi yang paling relevan dan penting, sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami.

- *Conslusions : Drawing or Verifying*, yaitu peneliti menguji kembali kesimpulan yang ditarik dengan data tambahan atau metode lain untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan teknik analisis di atas, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan temuan yang kredibel dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.9.6 Teknik Keabsahan Data

Menurut (Denzin, 1984), keabsahan data dalam penelitian dapat dicapai melalui triangulasi, yaitu teknik yang melibatkan penggunaan berbagai sumber, metode, perspektif untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan terpercaya. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk saling menghubungkan temuan dari berbagai sudut pandang, sehingga mengurangi keraguan dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

Pengolahan data dilakukan melalui langkah-langkah seperti pengamatan, penginterviewan, dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Peneliti menggambarkan tentang objek secara sistematis yang baik yaitu mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan diteliti.

Obsevarsi dilaksanakan dalam pengamatan yang jelas, rinci dan lengkap dalam keadaan tertentu yang berhubungan tema peneliti. Usaha untuk memahami makna, nilai penting, dan penjelasan dilakukan terhadap informasi yang telah dianalisis guna menemukan hal-hal yang esensial. Kesimpulan disusun dalam format yang ringkas dan jelas dengan merujuk pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, secara keseluruhan, proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan informasi di lapangan, yang

kemudian ditransformasikan menjadi penyatuan dan pengelompokan data. Setelah itu, data diringkas, dikurangi, dan disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

